

BERTEMU PGGP PAPUA BARAT, OMBUDSMAN PAPUA BARAT DORONG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK LINTAS SEKTOR

Rabu, 05 November 2025 - papbar

Manokwari - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat melakukan pertemuan dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) Papua Barat pada Selasa (04/11/2025). Pertemuan berlangsung di Kantor PGGP Papua Barat dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, bersama Asisten Pencegahan Maladministrasi, serta Sekretaris PGGP Papua Barat, Pdt. Markus Rudi Molle, dan sejumlah pendeta dari berbagai denominasi gereja di wilayah Papua Barat.

Pertemuan ini bertujuan membangun koordinasi dan menjalin kerja sama antara Ombudsman Papua Barat dan PGGP Papua Barat dalam memperkuat peran lembaga keagamaan dalam pengawasan pelayanan publik. Melalui kolaborasi ini, kedua pihak berkomitmen mengembangkan sinergi untuk mendorong pelayanan publik yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, menegaskan bahwa gereja memiliki peran penting sebagai mitra strategis Ombudsman dalam menyuarakan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.

"Gereja selama ini menjadi tempat masyarakat mencari keadilan dan pengharapan. Melalui kerja sama ini, kami ingin menjadikan gereja sebagai mitra aktif dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada jemaat mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna layanan publik," ujar Amus.

Sekretaris PGGP Papua Barat, Pdt. Markus Rudi Molle, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Ombudsman Papua Barat yang membuka ruang kolaborasi dengan lembaga keagamaan. Ia menilai kerja sama ini sangat relevan untuk memperkuat nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial yang sejalan dengan misi pelayanan gereja.

"Kami menyambut baik kerja sama ini. Gereja siap menjadi bagian dari gerakan moral untuk memastikan pelayanan publik di Papua Barat berjalan dengan baik dan berpihak kepada masyarakat kecil," ungkap Markus.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan awal untuk menindaklanjuti kerja sama melalui berbagai kegiatan bersama, seperti sosialisasi pengawasan pelayanan publik berbasis komunitas gereja, edukasi hak masyarakat, serta penguatan peran gereja sebagai mitra Ombudsman di tingkat akar rumput.

Melalui kolaborasi ini, Ombudsman Papua Barat terus memperluas jaringan kemitraan lintas sektor guna mendorong pelayanan publik yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkeadilan di Tanah Papua. (EK/ORI-PB)